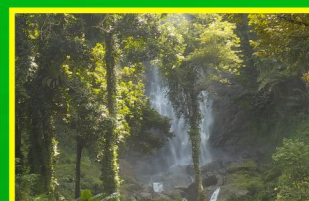


EKSEKUTIF SUMMARY

DOKUMEN INFORMASI KINERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIPKLHD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik. DIPKLHD yang sebelumnya dikenal dengan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) terdiri dari 2 (dua) buku.

Buku I menyajikan ringkasan eksekutif dari Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017. Buku II berisikan laporan utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Laporan utama ini disajikan dengan melakukan hubungan kualitas antara unsur-unsur penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan (*Pressure State and Response Analysis*).

Harapan saya, semoga Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIPKLHD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengambilan keputusan, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis, dan Sejahtera.

Akhirnya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan dokumen ini, saya ucapkan terima kasih.

Painan, 27 April 2018
BUPATI PESISIR SELATAN

H. HENDRAJONI, S.H., M.H.



BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 660/153/DLH-PS/2018

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. HENDRAJONI, S.H.,M.H.**

Jabatan : **BUPATI PESISIR SELATAN**

Menyatakan bahwa penetapan isu prioritas lingkungan hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah kami.

Adapun isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud adalah :

1. Bencana Alam Banjir
2. Meningkatnya Timbunan Sampah Domestik.
3. Penurunan Kualitas Air Permukaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar bisa digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 2 April 2018

BUPATI PESISIR SELATAN



H. HENDRAJONI, S.H.,M.H.

EKSEKUTIF SUMMARY

Berdasarkan amanat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 62 ayat 3 disebutkan bahwa Sistem Informasi Lingkungan Hidup paling sedikit memuat informasi mengenai Status Lingkungan Hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lainnya.

Seiring perkembangan waktu dan perkembangan kebijakan pemerintah, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah merupakan syarat dan indikator untuk penilaian kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) terkait kebijakan dan kinerjanya dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya. Bagi Kepala Daerah yang berprestasi dibidang pengelolaan lingkungan hidup diberikan penghargaan Piala Nirwasita Tantra yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia setiap tahunnya pada peringatan Hari Lingkungan Hidup di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2017 yang akan menjadi informasi kinerja Bupati Pesisir Selatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di Tahun 2017.

1. Profil Kabupaten Pesisir Selatan

Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan berada pada 0°59'-2°28,6' Lintang Selatan dan 100°19'-101°18' Bujur Timur, memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Selatan	: Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu
Sebelah Utara	: Kota Padang
Sebelah Timur	: Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan



Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Sebelah Barat : Samudera Indonesia.

Berdasarkan administrasi, Kabupaten Pesisir Selatan terbagi kedalam 15 wilayah Kecamatan, 182 Nagari dan 480 Kampung. Topografi wilayah berbukit dengan ketinggian berkisar 0 – 1.000 m dari permukaan laut, memiliki 47 buah pulau serta dialiri sebanyak 19 sungai. Kondisi permukaan lahan Kabupaten Pesisir Selatan dewasa ini adalah sebagian besar lahan hutan lindung yaitu 55 % dan kawasan budidaya sebesar 45 %.

2. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Isu prioritas dilakukan dengan cara partisipatif dan melibatkan semua stakeholder di Kabupaten Pesisir Selatan. Rangkaian kegiatan dalam penjaringan isu prioritas ini diawali dengan:

- 1) Rapat internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2) Menyurati Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dilakukan penjaringan isu;
- 3) Melakukan konsultasi publik terhadap isu prioritas yang sudah dilakukan penjaringan;
- 4) Penetapan isu prioritas melalui Surat Pernyataan Bupati Pesisir Selatan.

Metode atau pendekatan yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas daerah adalah scoring. Pertemuan penjaringan isu prioritas dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2018. Adapun isu prioritas yang ditetapkan 3 (tiga) isu prioritas, yaitu:

- 1) Bencana Alam Banjir.
- 2) Meningkatnya Timbulan Sampah Domestik.
- 3) Penurunan Kualitas Air Permukaan.

3. Analisis *Pressure*, *State*, dan *Response* Isu Lingkungan Hidup Daerah

3.1. Tekanan Terhadap Tataguna Lahan (*Pressure*)

Tekanan (*pressure*) terhadap tataguna lahan di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi isu strategis yaitu alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan kegiatan usaha, disamping isu-isu lainnya terkait



dengan tataguna lahan seperti : kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, kerusakan kawasan hutan akibat perambahan dan pembalakan liar, pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan dan kerusakan wilayah pesisir, terumbu karang dan mangrove.

Alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan kegiatan usaha hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk sangat signifikan, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan pangan dan perumahan serta kegiatan ekonomi masyarakat lainnya yang membutuhkan lahan untuk usaha.

Jumlah perubahan penggunaan lahan akibat pertambahan penduduk pada tahun 2017 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 515 Ha (0,21%).

Peningkatan pemanfaatan lahan untuk pemukiman dilakukan oleh masyarakat pada area tidak produktif, daerah rawa-rawa sehingga berkurangnya area resapan air. Di sisi lain kawasan gambut di Kabupaten Pesisir Selatan sebagian telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

3.2. Kondisi Lahan dan Statusnya (State)

Kawasan lindung di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan RTRW sebesar 318.725 Ha (55%) dengan total luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 579.495 Ha. Kawasan lindung terdiri dari : 1). Kawasan Hutan Lindung dengan luas 23.096 Ha; 2). Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW) dengan luas 295.629 Ha.

Diluar kawasan lindung tersebut adalah kawasan budidaya mencapai 260.770 Ha (45 %) dari total luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 579.495 Ha. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.



Kondisi lahan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan berbagai tekanan yang dihadapi menyebabkan tutupan lahannya cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan data dari UPTD Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk Kabupaten Pesisir Selatan, indeks tutupan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 berada pada angka 74,86 dan masih dalam kategori baik.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar.

Dibandingkan dengan luas hutan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 dengan tahun 2011 berdasarkan fungsi, telah terjadi pengurangan kawasan hutan seluas 34.319 Ha. Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam (KSDA & TNKS) terjadi pengurangan 21.197 Ha. Hutan lindung terjadi pengurangan 26.346 Ha. Hutan produksi terbatas berkurang 16.169 Ha. Akan tetapi hutan produksi bertambah 506 Ha dan hutan produksi konversi bertambah 28.887 Ha.

Luas lahan gambut berdasarkan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 14.000 Ha, dan berada di Kecamatan Lunang dan Silaut. Evaluasi kerusakan tanah dilahan basah yang dilakukan di PT. Incasi Raya Kecamatan Lunang masih berada di bawah baku mutu.

Hutan mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas 1.911,26 Ha dengan persentase tutupan 31,34% dan kerapatan pepohonan 1.110 batang/ha. Dibandingkan dengan luas pantai Kabupaten Pesisir Selatan, maka hutan mangrove hanya 0,42%.

Luas padang lamun di Kabupaten Pesisir Selatan diperkirakan 17 Ha dan mengalami kerusakan sebesar 24%.



Kerusakan padang lamun disebabkan oleh aktivitas pengerukan dan penimbunan yang dilakukan di sekitar wilayah pesisir seperti pembanunan jalan, perumahan atau pembangunan sarana dan parasarana pariwisata. Penangkapan ikan dengan trawl dan lainnya yang merusak padang lamun serta kerusakan oleh penduduk setempat yang tidak mengetahui banyak fungsi ekologis padang lamun.

Terumbu karang di Kabupaten Pesisir Selatan tersebar di Kecamatan Koto XI Tarusan dengan luas tutupan 1.800 Ha, Kecamatan IV Jurai 410 Ha, dan Kecamatan Batang Kapas 155 Ha. Kondisi terumbu karang di Kabupaten Pesisir Selatan cukup memprihatinkan, 52,78% dari terumbu karang berada dalam kondisi rusak, 19,78 kondisi sedang, 17,55% kondisi baik dan hanya 9,92% yang berada dalam kondisi sangat baik.

Penyebab kerusakan terumbu karang disebabkan pemanasan global, penangkapan dengan bahan peledak, penangkapan ikan dengan sianida, penggunaan trawl, pengelolaan tempat rekreasi di wilayah pesisir yang tidak memperhatikan lingkungan, pengambilan oleh wisatawan .

3.3. Upaya Pengelolaan Terhadap Tekanan Tataguna Lahan (Response)

Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan dilakukan diantaranya melalui : pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan dan/atau usaha, sosialisasi pada masyarakat terkait dampak akibat kerusakan lingkungan hidup, melarang pengambilan batu karang yang ada disekitar pantai ataupun di dasar laut, melarang membabat hutan mangrove, melarang pemakaian peledak dan bahan kimia lainnya dalam mencari ikan, melarang pemakaian pukot haimau untuk mencari ikan dan penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan hidup.

Penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan kepada pelaku yang melakukan kerusakan lingkungan hidup di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan yang melakukan perusakan wilayah pesisir, perusakan hutan mangrove, terumbu karang dan melakukan usaha tanpa izin lingkungan.

Upaya trasnplantasi dilakukan terhadap terumbu karang dengan pencakokan atau pemotongan karang hidup untuk ditanam di tempat lain dan ditempat karangnya telah rusak sebagai upaya rehabilitasi. Transplantasi terumbu karang dilakukan di Kecamatan Koto XI Tarusan di Pulau Seronjong Gadang, Pulau Setan, dan Pulau Pagang. Transpalantasi Terumbu Karang juga dilakukan di Kecamatan IV Jurai yaitu di Pulau Aua.

Upaya memulihkan fungsi dan manfaat ekosistem pesisir sebagai jalan hijau (green belt) melalui penanaman cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) disepanjang pesisir pantai yang dilakukan di Pantai Surantih Kecamatan Sutera sebanyak 3.500 batang, Pantai Sumedang Kecamatan Ranah Pesisir sebanyak 3.000 batang dan Pantai Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti sebanyak 4.500 batang. Upaya reboisasi tidak terlaksana di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan upaya penghijauan dilakukan dengan penanaman pohon sebanyak 60.000 batang bibit kayu-kayuan di Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera dan Kecamatan Linggo Sari Baganti.

3.4. Isu Prioritas Kualitas Air dan Tekanan (*Pressure*)

Pembangunan di berbagai sektor yang dilakukan di dalam suatu wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak saja akan mempengaruhi kondisi lingkungan ekosistem darat yang ada, tetapi juga akan sangat mempengaruhi ekosistem perairan khususnya ekosistem sungai didalam wilayah tersebut.

Hal ini terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu pada



sungai Batang Lunang dimana terlihat dari hasil pemantauan kualitas air sungai adanya konsentrasi parameter fisika dan kimia melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2008 tentang Kualitas Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat. Karena itu isu utama dalam kualitas air untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu “***Penurunan Kualitas Air Permukaan Batang Lunang***”

Penyebabnya adalah ulah manusia, dimana penduduk yang tidak memiliki jamban sendiri itu berkisar antara 23,14% serta punya jamban sendiri tapi di alirkan ke sungai sebanyak 25,15 %. Sedangkan dari sampah juga menyebabkan kualitas air turun, dari hasil pengukuran timbulan sampah untuk area sungai Batang Lunang sebesar 0,3 kg/orang/h kali jumlah penduduk area sungai itu sebesar 14.282 orang jadi jumlah timbulan sampahnya sebesar 4.284,6 kg/h. Dengan data tersebut kita dapat mengetahui bahwa sumber pencemar dari limbah rumah tangga ke badan air cukup besar. Ini dapat dilihat dari grafik data kualitas air sungai Batang Lunang yang di ukur pada dua musim.

Selain sumber pencemar dari limbah rumah tangga juga disebabkan oleh kegiatan industri sawit yang aliran limbah cairnya ke badan air yaitu pabrik sawit PT. Incasi Raya serta kegiatan perkebunan sawit masyarakat yang cukup luas sebagai penyumbang zat pencemar ke badan air selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi alami tanah sekitar area Batang Lunang sebagai tanah gambut.

3.5. Kondisi Kualitas Air dan Statusnya (State)

Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai 15 kecamatan dan semuanya dialiri sungai sebanyak 19 sungai. Sungai ini difungsikan oleh masyarakat untuk kegiatan air baku air minum, mandi, cuci dan kakus. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya pertumbuhan penduduk disepanjang aliran sungai



Kabupaten Pesisir Selatan sekarang telah bertambah pemukiman penduduk, industri, pelabuhan kapal nelayan, irigasi dan penambangan galian C. dengan keadaan seperti itu sangat memungkinkan rumah tangga, industri, pertanian, pelabuhan kapal nelayan dan pertambangan galian C sebagai penyumbang pencemar terbesar pada sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebab dijadikan drainase alami.

Air laut di kabupaten Pesisir Selatan ini belum terjadi pencemaran. Karena dilihat dari hasil pemantauan kualitas air laut masih dalam ambang baku mutu. Walaupun saat ini sudah ada kegiatan wisata bahari di beberapa pulau di Kabupaten Pesisir Selatan ini.

3.6. Upaya Pengelolaan Terhadap Tekanan Kualitas Air (*Response*)

Terjadinya degradasi sungai Batang Lunang maka dilakukan upaya pengelolaannya oleh pemerintah dengan cara-cara sebagai berikut: 1). Dilakukannya pemindahan aliran sungai yang awalnya tergabung dengan beberapa sungai sekarang di jadikan satu aliran saja yang langsung bermuara kelaut; 2). Dilakukan pembersihan sungai dengan mengangkat sedimen yang ada di dalam sungai; 3). Membangun tebing pengaman sungai agar tidak terjadi erosi; 4). Penyuluhan tentang pertanian ramah lingkungan dengan cara menggunakan pupuk organik; 5). Melakukan Pengelolaan sampah rumah tangga; 6). Pengelolaan limbah cair pabrik

3.7. Isu dan Tekanan Terhadap Pencemaran Udara (*Pressure*)

Adapun sumber tekanan yang dihasilkan polutan pencemar udara adalah : **a). Aktifitas Lalu Lintas**, Kendaraan di Kabupaten Pesisir Selatan ini selalu ada peningkatan jumlahnya hal ini dilihat dari tabel 31.A untuk kendaraan pada tahun 2017 yang bahan bakarnya premium sebanyak 314.620 dan solar 7.243 unit. Pesisir



Selatan saat ini sebagai daerah tujuan wisata maka peningkatan kendaraan yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan juga mempengaruhi kualitas udara ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung ke tempat wisata di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 4.740.077 orang; **b). Pertanian**, Kegiatan pertanian merupakan sumber terbesar polusi partikel halus karena pertanian menggunakan pupuk yang mengandung amoniak bercampur dengan gas nitrogen oksida dan sulfat dari pipa knalpot mobil, maka akan terbentuk partikel padat mikroskopis yang disebut aerosol; **c). Industri**, Industri yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan saat ini yaitu industri pabrik sawit dan industri Stone Crusher. Kegiatan industri ini menyumbang pencemar terhadap kualitas udara. Hal ini di buktikan dengan zat pencemar yang dihasilkan. Walau demikian zat pencemar yang dihasilkan tidak ada yang melebihi baku mutu yang ditetapkan;

3.8. Kondisi Udara dan Statusnya (State)

Untuk pemantauan kualitas udara ambient dilakukan pada lima titik yaitu udara ambient area PT. Incasi Raya, area PT. Kemilau Permata Sawit, area SPBU Koto Salapan Palangai, area Puskesmas Inderapura, area Puskesmas Tarusan dari hasil pemantauan di ketahui tidak ada parameter yang melebihi baku mutu.

3.9. Upaya Pengelolaan Kualitas Udara (Response)

Untuk sektor transportasi dilakukan kebijakan terhadap kendaraan umum dan dinas untuk melakukan KIR kendaraannya di Dinas perhubungan, juga penerapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu lintas yang dilakukan oleh polisi bahwa tidak boleh menggunakan kendarpot kendaraan yang tidak standar. Serta penanaman pohon pelindung di tepi jalan untuk menyerap zat pencemar udara.



3.10. Isu Prioritas Kebencanaan dan Tekanan (*Pressure*)

Di Kabupaten Pesisir Selatan banyak sekali faktor yang membuat terjadinya banjir ini, ada yang berasal memang karena faktor alam seperti curah hujan yang tinggi itu dapat dilihat dengan nilai curah hujan sebesar 1.306,4 mm/bln pendangkalan sungai akibat erosi tebing sungai dan dari daerah hulu, dan ada juga yang berasal dari faktor manusia seperti berkurangnya kerapatan tanaman di sempadan sungai akibat pembangunan di sempadan sungai atau aktifitas manusia. Tekanan terbesar banjir berasal dari pembukaan lahan akibat pertambangan sedangkan untuk wilayah perkotaan tekanan penyebab banjir berasal dari alih fungsi lahan menjadi perumahan.

3.11. Kondisi Kebencanaan dan Statusnya (*State*)

Banjir di Kabupaten Pesisir Selatan hampir setiap tahun terjadi demikian juga dengan tahun 2017 ini. Banjir terjadi di Kecamatan Koto XI Tarusan, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Jurai, Linggo Sari Baganti dan Silaut. Kejadian banjir di beberapa kecamatan tersebut diakibatkan kondisi dari alih fungsi lahan untuk permukiman dari 37.694 Ha menjadi 38.209 Ha, dan akibat curah hujan yang tinggi yaitu 1.306, 4 mm/bln.

3.12. Upaya Pengelolaan Kebencanaan (*Response*)

Upaya pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1) Dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) adanya Program Pengendalian Banjir
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kegiatan yang sudah dilaksanakan di Pesisir Selatan adalah : Pembentukan Kelompok/Forum Siaga Bencana (KSB), Sosialisasi yang terkait dengan informasi mengenai PRB oleh pemerintah dan LSM (NGOs), Pelatihan tanggap darurat antar instansi, Pembangunan

shelter tsunami and jalur evakuasi di beberapa lokasi/tempat, Simulasi bencana secara periodic, Rencana tata ruang sudah ada, dan badan perencanaan tata ruang sudah terbentuk.

- 3) Masyarakat, kegiatan yang dilakukan penanaman bambu di daerah aliran sungai Batang Tarusan pada saat acara Festival Bambu oleh masyarakat Kenagarian Nanggalo, Penanaman pohon disekitar mata air di Kenagarian Pancung Taba.

3.13. Isu Prioritas dan Tekanan Terhadap Lingkungan Perkotaan (Pressure)

Dengan pesona alam yang begitu mempesona membuat banyak datang wisatawan ke Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari data jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 sebanyak 4.740.077 orang. Namun dengan menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah destinasi wisata membawa dampak lingkungan terutama “**Peningkatan Timbulan Sampah Domestik di Daerah Wisata**” inilah yang jadi isu utama terhadap tekanan lingkungan perkotaan.

3.14. Kondisi Lingkungan Perkotaan dan Statusnya (State)

Berdasarkan data jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 sebanyak 531.886 jiwa. Dengan jumlah penduduk terbanyak pada Kecamatan Lengayang yaitu 65.650 jiwa sedangkan paling sedikit di Kecamatan Bayang Utara yaitu 9.184 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan ini setiap tahun selalu terjadi peningkatan.

Jumlah penduduk yang besar bukanlah hal satu-satunya faktor penentu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, namun juga distribusi dan kepadatan penduduk yang menempati suatu wilayah. Semakin tinggi kepadatan penduduk atau populasi penduduk, maka semakin banyak juga kebutuhan hidup yang diperlukan, dan akan semakin banyak juga sumber alam yang akan

diambil untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu juga akan timbul bermacam permasalahan lingkungan dengan meningkatnya jumlah populasi seperti terjadinya kepadatan arus lalu lintas dimana akan menyebabkan pencemaran udara.

Peningkatan jumlah penduduk ini juga menimbulkan peningkatan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain dari peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan timbulan sampah banyak di Kabupaten Pesisir Selatan ini juga disebabkan aktifitas di objek wisata serta kegiatan penunjang seperti adanya rumah makan dan hotel atau penginapan. Ini terlihat dari data jumlah pengunjung ke objek-objek wisata sebanyak 4.740.077 orang, rumah makan dan hotel atau penginapan sebanyak 27 unit.

3.15. Upaya Pengelolaan Terhadap Isu Tekanan Lingkungan Perkotaan (*Response*)

Upaya yang dilakukan terhadap sampah sebagai tekanan lingkungan adalah sebagai berikut ini:

- 1) Dibuatkan Perda No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dan salah satu pasalnya tentang pembuangan sampah sembarangan serta pelanggaran yang diberikan.
- 2) Sosialisasi kemasyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah terutama sampah rumah Tangga.
- 3) Himbauan dan Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
- 4) Gerakan Satu Nagari Satu Bank Sampah. Pembangunan Bank Sampah di Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera
- 5) Pemanfaatan Sampah Sebagai sarana-prasarana objek wisata

4. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat diuraikan secara rinci dibawah ini :



4.1. Pembangunan Bank Sampah Di Beberapa Kecamatan dan Rumah Kompos di Pasar Inpres Painan.

Pemerintah Daerah merencanakan membangun Bank Sampah di setiap nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Sampai saat ini dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, telah dilakukan pembangunan Bank Sampah pada 4 Kecamatan yaitu di Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 5 unit Bank Sampah yang lokasinya 4 unit berada di Sekolah Adiwiyata dan 1 unit di Pasar Tarusan. Di Kecamatan IV Jurai sebanyak 6 Unit, yaitu 1 unit Bank Sampah Induk, 4 unit di Sekolah Adiwiyata dan 1 unit di Kantor Wali Nagari Painan. Sedangkan di Kecamatan Batang Kapas sebanyak 3 unit, yaitu 2 unit di Sekolah Adiwiyata dan 1 unit di Pasar Batang Kapas serta Kecamatan Sutera 1 unit yang berada di Pasar Ampiang Parak.

Disamping itu juga telah dimanfaatkan bangunan pemerintah yang berada di lokasi Pasar Painan sebagai rumah kompos. Rumah Kompos ini mengolah dan memanfaatkan sampah-sampah organik yang ada di Pasar Inpres Painan, untuk menjadi pupuk organik. Hasil produksi pupuk organik ini, juga telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tanaman bunga dan buah-buahan di pot-pot yang ada di rumah-rumah maupun untuk kegiatan tanaman hortikultura oleh petani yang bergerak tanaman organik.

4.2. Pengelolaan Sampah dengan Menggunakan Perahu

Meningkatnya kunjungan wisata pada Pantai Carocok Painan dan Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh secara langsung memberikan tekanan terhadap lingkungan dan apabila tidak dilakukan upaya pengelolaan maka akan mengalami degradasi lingkungan di objek wisata akan mengalami penurunan kualitas lingkungan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah dengan menyediakan perahu

yang akan membersihkan sampah-sampah disepanjang pantai pada lokasi-lokasi objek wisata. Pengelolaan sampah ini melibatkan masyarakat-masyarakat lokal yang berada di lokasi objek-objek wisata, sehingga dapat menimbulkan rasa memiliki dan menjaga dari masyarakat terhadap objek wisata dan lingkungan.

Perahu-perahu sampah yang terdapat di lokasi objek wisata dapat dilihat sebagaimana Gambar 4.1. berikut :



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, 2017

Gambar 4.1. Masyarakat Terlibat Dalam Pengelolaan Sampah



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, 2017

Gambar 4.2. Perahu Pengakut Sampah

4.3. Konservasi Penyu

Konservasi penyu dilaksanakan di kenagarian Amping Parak oleh Kelompok Laskar Penyu sejak tahun 2013, di kecamatan IV Jurai oleh Kelompok Masyarakat Cinta Bahari, di Pulau Nyamuak Kecamatan Koto XI Tarusan oleh Kelompok Masyarakat Tuanku Lareh, di Kecamatan Lengayang yang

merupakan pengembangan dari kegiatan di Kenagarian Amping Parak.

4.4. Penanaman Mangrove

Penanaman mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2017 di lakukan di Taluak Dalam Kapo-Kapo Pulau Cubadak Kecamatan Koto XI Tarusan. Melibatkan Putra-Putri Maritim tingkat Provinsi Sumatera Barat, seluas 1.000 m². Kegiatan merupakan percontohan yang akan di tindak lanjuti oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.

Kegiatan penanaman mangrove juga dilakukan oleh kelompok masyarakatan pencinta lingkungan di daerah Sumedang dan Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir sebanyak 9.000 batang bibit yang menjangkau luas areal sekitar 1 ha. Dan kelompok masyarakat pencinta lingkungan di kenagarian Ampiang Parak Kecamatan Sutura yang melakukan kegiatan penanaman bibit mangrove sebanyak 35.000 batang.

Lokasi penanaman mangrove ini menjadi penunjang kawasan wisata pantai Sumedang dan kawasan wisata Ampiang Parak dengan ikon kunjungan wisata melihat aktifitas kegiatan penyelamatan penyu.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, 2017

Gambar 4.4. Penanaman Mangrove

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Jl. Rohana Kudus Telp / Faks. 0756 - 21059
PAINAN**